

**PENERAPAN ASAS INDEPENDENSI PERADILAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI**

SKRIPSI

Oleh

Nur Dyah Azizah

NIM. 05020722066



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Dyah Azizah
NIM : 05020722066
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Penerapan Asas Independensi Peradilan Dalam
Putusan Hakim Nomor 1/Pid,Sus-TPK/2025/PT
DKI

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Januari 2026
yang menyatakan,



Nur Dyah Azizah
NIM. 05020722066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Dyah Azizah

NIM : 05020722066

Judul : Penerapan Asas Independensi Peradilan Dalam Putusan Hakim
Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 21 Januari 2026

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imron Rosyadi', written over a large, stylized, and somewhat abstract graphic element that resembles a signature or a decorative flourish.

Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

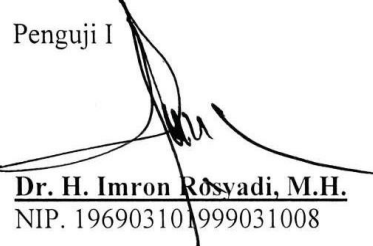
Nama : Nur Dyah Azizah

NIM. : 05020722066

Judul : Penerapan Asas Independensi Peradilan Dalam Putusan Hakim Nomor 1/Pid,Sus-TPK/2025/PT DKI

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, 24 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. H. Privo Handoko SS, S.H., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji III

H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 1 April 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,


Dr. H. Sunnah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196306271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Dyah Azizah
NIM : 05020722066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : nurdyahzh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Penerapan Asas Independensi Peradilan Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 April 2026

Penulis

(Nur Dyah Azizah)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT DKI yang mengadili perkara korupsi PT Timah oleh Harvey Moeis menjadi perhatian masyarakat karena adanya perbedaan signifikan antara putusan tingkat pertama dan putusan banding, serta kuatnya tekanan opini publik melalui media sosial yang dapat mempengaruhi sejauh mana independensi hakim dalam memutus perkara tanpa adanya intervensi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT DKI dan bagaimana penerapan asas independensi peradilan dalam putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui putusan pengadilan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT DKI, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai penerapan asas independensi peradilan dalam putusan hakim.

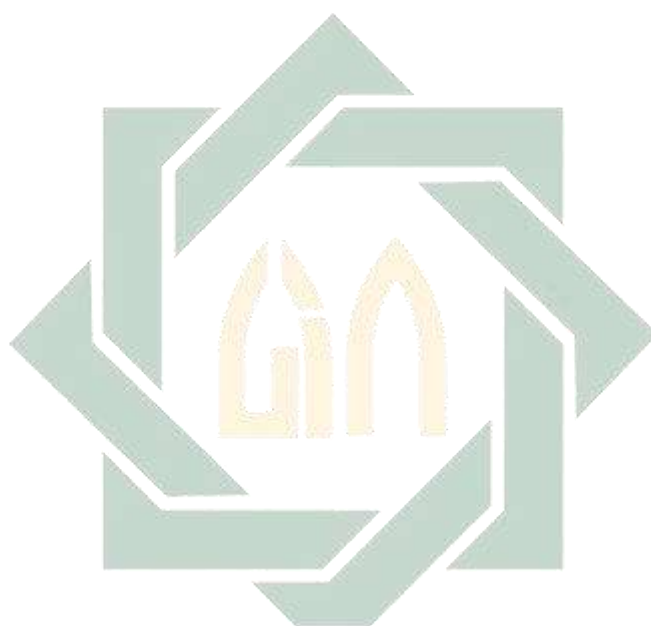
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI pemberatan pidana terhadap Harvey Moeis dari 6 tahun menjadi 20 tahun penjara merupakan pelaksanaan kewenangan *judex facti* yang didasarkan pada tingginya tingkat kesalahan, peran strategis terdakwa, serta besarnya kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan teori utilitarian Jeremy Bentham yang menekankan kemanfaatan sosial dan efek jera, serta mencerminkan penerapan asas independensi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar hakim semakin memperkuat integritas, profesionalitas, dan keteguhan sikap dalam menghadapi tekanan eksternal, serta bagi lembaga peradilan untuk terus membangun mekanisme perlindungan terhadap independensi hakim, selain itu masyarakat juga diharapkan lebih memahami batas antara partisipasi publik dan intervensi terhadap proses peradilan demi terwujudnya sistem peradilan yang adil, mandiri, dan berwibawa.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	18
BAB II KERANGKA TEORI	21
A. Sistem Peradilan Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Korupsi.....	25
C. Asas Independensi Peradilan.....	28
D. Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman.....	41
E. Teori Ultilitarian Jeremy Bentham.....	46
BAB III INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM	50
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan.....	53
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	69
BAB IV PENERAPAN ASAS INDEPENDENSI DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI JKT	79
A. Penerapan Asas Independensi Dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS- TPK/2025/PT DKI.....	79

BAB V Penutup	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	106



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

(i) Buku

Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. edisi ke-2. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafitika, 2008.

Anwar, Yeswil, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.

Arief, M Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Arifin, Zainul. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafitika, 2005.

———. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

———. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Ed 1 Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1789.

Danil, Elwil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Djarmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum: dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2022.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

- Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Sinar Grafitika, 2004.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafitika, 2008.
- _____. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Pt Gramedia, 1984.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahp: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafitika, 2020.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafitika, 2007.
- Hiariej, Eddy. *Hukum Acara Pidana*. edisi ke-11. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2025.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Husein, Harun M. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafitika, 1992.
- Husin, Kadri, dan Budi Riski Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafitika, 2016.
- Imron, Rosyadi. *Buku Ajar Hukum Pidana Khusus*. Kota Metro: Pt Insight Pustaka Nusa Utama, 2025.
- J.M. van Bemmelen. *Strafvordering: Leerboek van Het Nederlandse Strafprocesrecht*. Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers, 1957.
- Krismen, Yudi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021.
- M. Friedman, Lawrence. "The Legal Sistem: A Social Science Perspective." In *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M.Khozim. Cetakan Kedua. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Makarao, Taufik, And Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Mappiasse, M. Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. edisi ke-3. Jakarta Timur: Sinar Grafitika, 2023.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Pt Alumni, 2005.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- O.S Hiariej, Eddy. *Hukum Pidana*. edisi ke-2. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2022.
- Prakoso, Djoko. *Kedudukan Justisiabel di dalam Kuhap*. Jakarta: Penerbit Halia Indonesia, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. edisi ke-7. Bandung: Sumur, 1977.
- Prodjohamidjo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Jakarta: Mandar Maju, 2001.
- Rm, Suharto. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafitika, 1997.
- Robert, Klitgaard. *Membasmi Korupsi Terjemahan Hermoyo*. Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Shetreet, Shimon, dan Jules Deschênes. *Judicial Independence: The Contemporary Debate*. Terjemahan. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, dan Anis Hidayatul Imtihanah. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Tjitrosoedibio, R. Subekti dan R. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

(ii) Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Adiyaryani, Ni Nengah. "Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2017. 1-289.
- Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2020): 84-99.
- Almega, Debby Wulandari, Ino Susanti, dan Tian Terina. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Bupati." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 4, No. 2 (2021):110-125.
- Amrianto, Andika Dwi. "Peran Kepastian Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Korupsi: Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Yyk." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2023): 208-224.
- Azwarman, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, dan Jelly Leviza. "Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3 (2021): 445-463.
- Berliana, Melisa, Yennie K. Milono, dan Lilik Prihatini. "Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia." *Palar (Pakuan Law Review)* 9, No. 1 (2023): 26-39.
- Elawati, Tuti, Budi Pramono, Zahra Malinda Putri, Syaiful Bahari, dan Yusup Suparman. "Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Justlaw: Journal Science And Theory Of Law* 2, No. 1 (2025): 56-72.
- Ginsburg, Tom. "Judicial Audiences and Reputation: Perspectives from Comparative Law." *California Law Review* 102, No. 1 (2014): 459-490.
- Hafiz, Muhaimin Al, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi. "Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No: 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst Dan No: 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, No. 7 (2023): 608-623.
- Haikal, M. Surya, dan Indriati Amarini. "Independensi Peradilan: Studi Kritis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang Memberikan Putusan dalam Kasus Ronald Tannur." *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 2 (2025): 206-214.

- Ihsan, Reza Noor. "Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Recht Vervolging*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 12, No. 1 (2022): 66-79.
- Ismail, Kautsar. "Kebebasan Pendapat Hakim dalam Perbedaan Pendapat *Dissenting Opinion* Pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat." *Proceeding Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium* (2022): 294-307.
- Kabes, Irianto, Agus Sugiyatmo, Gabriela Andriyani Jaiheno, dan Simona Bustani. "Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam di Mahkamah Agung (Studi Kasus: Putusan Nomor 5779 K/Pid.Sus/2023)." *Journal Of Law, Administration, And Social Science* 4, No. 3 (2024): 441-451.
- Korua, Ryvaldo Vially, Harold Anis, dan Youla O. Aguw. "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020): 234-243.
- Mulyadi, Canisya Pradiani, Nabila Sagita, Muhammad Fadhlan Al Hafizh, dan Rizqie Achmad. "Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis Dan Runtuhnya Kepercayaan Publik." *Media Hukum Indonesia* 2, No. 5 (2025): 225–237.
- Mustaqim, Farid Nur, Dani Wika Kusuma, dan Rafifa Merynda Khairunisa. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Perspektif Teori Lawrence." *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 2 (2025): 153-164.
- Noviacahyani, Wahyu, Elly Sudarti, Dan Yulia Monita. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Pampas: Journal Of Criminal Law* 3, No. 3 (2022): 264-282.
- Odhy, Fakhruddin. "Perspektif Budaya Hukum dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia." *Dharmasisya* 1, No. 1 (2021): 185-196.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman." *Jurnal El-Dusturie* 1, No. 1 (2022): 6301-6314.
- Pranowo, Yogie. "Prinsip Utilitarisme Sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat." *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 26, No. 2 (2020): 172-179.
- Pratama, Aditya Ilham, Sofyan Wegi Alfariki, dan Isna Diana. "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman." *Jurnal Tana Mana* 6, No. 1 (2025): 138-152.

- Pratama, Angga, Elwi Danil, dan Azmi Fendri. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 1659-1668.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose Or Methods Of Legal Products Examination?" *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022): 270-293.
- Pudjiastuti, Diah. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Independensi Hakim di Indonesia." *Jurnal: Res Nullius Law Journal* 5, No.2 (2023): 112-122.
- Ramadhan, Hilal, Yusrizal, dan Fauzah Nur Aksa. "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, No. 2 (2021): 21-29.
- Ridwansyah, Rizki. "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, No. 2 (2023): 1-25.
- Riley, Jonathan. "Utilitarianism and Economic Justice." *The Journal Of Ethics* 29, No. 2 (2023): 245–262.
- Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Hukumrespublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, (2022): 179-188.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, No. 2 (2020): 168-187.
- Unas, Sandro. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Et Societatis* 7, No. 4 (2020): 58-65.
- Ura Weruin, Urbanus. "*Dissenting Opinion* Para Hakim dalam Pengadilan: Fungsi dan Ancamannya." *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, No. 10 (2024): 12359-12367.
- Wijayanti, Natasha. "Telaah Eksistensi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid/2017)." *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7, No. 2 (2021): 283-291.
- Zuhrah, Adi Sulistiyono, Ikhsan, Ridwan dan Samsudin. "Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung." *Fundamental*, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 13 (2024): 47-70.

Zulhakim, Mohammad Ekaputra, dan Marlina. "Putusan Lepas (*Onstlag*) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, No. 12 (2023): 976-985.

(iii) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(iv) Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2024.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri DKI pada Tingkat Banding Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/PT.DKI., tanggal 3 Februari 2025.

(v) Data Elektronik

Bisri, M. Mustofah. "Kasus Harvey Moeis: Antara Keadilan, Viralitas, Dan Independensi Peradilan Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025. Akses 2 November 2025, <https://share.google/0cmifvnlgkaex6ub4>.

Diva, Nurul. "Rangkuman Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Dari Awal Hingga Divonis 6,5 Tahun Penjara." *Liputan 6*, 29 Desember 2024, akses 26 Oktober 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5855246/rangkuman-kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dari-awal-hingga-divonis-65-tahun-penjara?page=2>.

Hutajulu, Matius Alfons. "Polemik Putusan Harvey Moeis Bikin Hakim Pemvonis Diusut Etik." *Detiknews*, 20 Januari 2025, akses 2 November 2025 <https://share.google/Jg6ruveccwwhuxc3u>.

Setuningsih, Novianti, And Irfan Kamil. "Ky Periksa Tertutup Hakim Yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara." *Kompas.Com*, 20 Mei 2025, akses 2 November 2025, <https://share.google/Urrcy100hgcnsvjqc>.